



Pemkab Terima Rp6,3 M dari Pusat



TRIBUN PONTIANAK/HADI
SUDIRMANSYAH
RAPAT - Pj Bupati Kubu
Raya Syarif Kamaruzaman
memimpin rapat persiapan
rencana pengaktifan
Kecamatan Kumpai Raya
di Ruang Pamong Praja II
Kantor Bupati Kubu Raya,
belum lama ini.



Serapan Anggaran Belanja 66 Persen

KUBURAYA, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerima dana insentif sebesar Rp 6,3 miliar dari Pemerintah pusat atas serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah mencapai 66 persen di triwulan III tahun 2024.

"Dari serapan 66 persen inilah kami diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan insentif sebesar Rp 6,3 miliar," kata Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzzaman, kemarin.

Lanjutnya, dari kucuran dana insentif ini tidak terlepas dengan tata kelola keuangan yang membaik. Dikatakannya, hal ini tidak terlepas dari berbagai pertemuan intens bersama kepala OPD dan Tim Anggaran (TAPD) untuk menggali sumber pendapatan.

Pj Bupati Kubu Raya juga mengatakan kucuran dana itu diberikan pemerintah pusat menilai keberhasilan Pemkab Kubu Raya dalam tata kelola pendapatan daerah yang signifikan. Dalam hal ini nilai serapan anggaran sebesar 66 persen terhitung hingga saat ini.

Ia menuturkan jika dana insentif itu difokuskan ke tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi. Sedangkan infrastruktur masih menggunakan anggaran daerah.

Selanjutnya, bersumber dari dana insentif ini, dia-



Kita lihat infrastruktur puskesmas dan pustu dari segi fisik masih memprihatinkan. Makanya kita putuskan rehab.

Sy Kamaruzzaman
Pj Bupati Kubu Raya

lokasikan untuk pengadaan buku di bidang pendidikan. Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan untuk pembangunan fisik.

"Kita lihat infrastruktur puskesmas dan pustu dari segi fisik masih memprihatinkan. Makanya kita putuskan rehab," ucapnya.

Dan untuk pengembangan ekonomi akan fokus pada potensi pasar tradisional khususnya pasar Menanjak dan Sejati yang perlu penataan.

"Malah memilih berdagang di jalan, tentunya menambah kumuh pembangunan. Untuk itulah kita ambil kebijakan dengan memberikan izin, kedua kita berikan kebebasan retribusi selama tiga bulan," ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya

juga memberikan kemudahan untuk menambah modal pedagang. Dikatakannya, para pedagang yang menempati dua pasar ini juga akan diberi akses di perbankan untuk mengembangkan usahanya melalui kredit usaha rakyat.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kubu Raya, meminta pemkab mempercepat penyerapan anggaran terutama dalam pelaksanaan kegiatan fisik guna menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi pada akhir tahun anggaran.

"Setelah proses persetujuan anggaran, pelaksanaan kegiatan harus segera dilakukan, terutama untuk proyek-proyek fisik yang bisa terkendala oleh waktu dan cuaca," ujar Wakil Ketua III DPRD Kubu Raya, Suharso, belum lama ini.

Menurutnya, ketidakmampuan dalam menyerap anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan bisa berujung pada terjadinya Silpa, yang akan berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan di Kubu Raya.

"Jika penyerapan anggaran tidak optimal, kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan ini bisa terhambat, dan sisa anggaran akan menjadi Silpa, yang tidak baik bagi tata kelola pemerintahan kita," tambahnya. (hdi)